BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS
Subyek : Bendungan
Edisi : 25 APRIL 2008
Hari : JUMAT
Hal. : 22

Warga Tolak Bendungan

Alasan Pemerintah Tak Masuk Akal

Pacitan, Kompas - Ribuan warga dari enam desa di dua kecamatan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, berunjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Pacitan, Kamis (24/4). Pengunjuk rasa menolak rencana pembangunan Bendungan Kedungbendo di wilayah mereka.Warga enam desa yang berunjuk rasa itu berasal dari Desa Kedungbendo, Jetis Kidul, dan Mangunharjo di Kecamatan Arjosari serta Desa Kebondalem, Gedangan, dan Ngerso di Kecamatan Tegalombo. Pengunjuk rasa menggunakan 15 truk untuk berangkat dari desa mereka ke Kantor Pemkab Pacitan yang berjarak sekitar 20 kilometer.

Menurut Ketua I Forum Masyarakat Tegalombo dan Arjosari Sri Widiowati Atmojo, bendungan akan dibangun di lahan yang ditinggali sekitar 1.600 keluarga. ”Warga yang menolak bendungan tidak hanya 1.600 keluarga ini, tetapi juga warga di sekitar. Jumlah seluruhnya 2.231 keluarga,” tutur Sri.

Sri mengatakan, warga menolak karena tanah dan rumah yang mereka tinggali sekarang adalah peninggalan leluhur. Warga tidak mungkin melepas warisan leluhur itu kepada orang lain.Selain alasan itu, mereka menilai alasan pemerintah—yang menyebutkan bendungan dibuat untuk menangani banjir yang kerap terjadi di kota Pacitan setiap musim hujan—tak masuk akal. ”Ada cara lain mencegah banjir, seperti membuat dam di sepanjang sungai penyebab banjir,” ucap Sri.

Warga juga menilai alasan pemerintah membuat bendungan untuk mengairi 1.000 hektar lahan pertanian di Pacitan tidak masuk akal. Sebagian besar lahan di Pacitan tidak bisa digunakan untuk pertanian karena berbatu dengan kemiringan 45 derajat.

”Begitu pula alasan menjadikan bendungan sebagai lokasi wisata. Di Pacitan ini masih banyak daerah wisata yang belum digarap dengan baik. Seharusnya daerah-daerah itu dioptimalkan daripada membuat lokasi wisata baru,” papar Sri.

Tahap survei

Rencana pembangunan bendungan saat ini telah mencapai tahap survei dan studi kelayakan oleh konsultan pembangunan PT Tata Guna Patria. Warga meminta agar survei dan studi kelayakan itu juga dihentikan.

Penolakan warga, menurut Sri, telah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, dan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak-pihak itu.

Perwakilan warga ditemui Bupati Pacitan Sujono, Wakil Ketua DPRD Pacitan Syamsuri Arif, dan pejabat pemkab lainnya. Namun, pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu berakhir tanpa hasil. Pemkab Pacitan tidak bisa memutuskan karena rencana pembangunan waduk adalah kebijakan pemerintah pusat.

Sujono hanya berjanji akan menyampaikan penolakan warga kepada pemerintah pusat. Setelah pertemuan tersebut, warga pun membubarkan diri. (apa)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup